

**ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN APBDES PEMBANGUNAN FISIK TAHUN  
2021**

**DI DESA PETUNGSEWU KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**OLEH :**

**ARIES NOBER IWAN NOME**

**NIM : 2017210025**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2022**

## **Ringkasan**

Dalam administrasi publik Terminasi kebijakan ditetapkan selaku suatu langkah yang berarti buat melaksanakan koreksi terhadap suatu kebijakan yang tepat dan buat mengalokasikan risorsis secara lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Terminasi Kompleksitas Kebijakan Desa di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jenis riset yang dimanfaatkan periset adalah riset deskriptif dengan pendekatan riset Kualitatif. Lokasi penelitian diadakan di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Adapun fokus riset ini yaitu; (1) Terminasi Kompleksitas kebijakan pemerintah Desa Petungsewu. (2) Masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah Desa Petungsewu. (3) Bagaimana dampak yang dialami oleh pemerintah Desa Petungsewu. Informan dalam penelitian ini; (1) Kepala Desa Petungsewu, dimana dia selaku kepala di kantor yang mengenali Kepala jelas menimpa kebijakan serta program prioritas desa;( 2) BPD desa dimana mereka selaku mengulas serta menyepakati rancangan serta peraturan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi

**Kata Kunci: Terminasi Kebijakan Kompleksitas**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

## 1.1.Latar Belakang

Dalam administrasi publik Terminasi kebijakan ditetapkan selaku suatu langkah yang berarti buat melaksanakan koreksi terhadap suatu kebijakan yang tepat dan buat mengalokasikan risorsis secara lebih efektif. maka terhentinya langkah terminasi suatu kebijakan yang dianggap kurang baik hendak berdampak pada resiko yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan tersebut. Dalam bahasa yang lebih simpel, Brewer(1978) menandakan kalau terminasi ialah upaya penyesuaian (adjustment) kebijakan yang dikira disfungsi, mubazir, ataupun tidak dibutuhkan. Tetapi langkah penggantian yang lebih ditunjukkan oleh bermacam aspek politik, proses terminasi kebijakan ialah kegiatan politik yang sangat problematik. Tujuannya merupakan buat merubah kebijakan ataupun program yang disfungsi ataupun kuno serta mempermudah pencapaian target kebijkskn.

Terminasi kebijakan publik sanggup dimaksud sebagai sesuatu konklusi yang teliti dan waspada ataupun penghentian guna, program, kebijakan maupun organisasi tertentu( Brewer serta deleon 1983; deleon 1978). Watak waspada ini menunjukkan jika langkah yang dicoba ialah rasional; terminasi ialah sikap yang terencana tadinya menyangkut penghentian maupun penutupan suatu organisasi maupun kebijakan publik tertentu. Terminasi ditetapkan selaku outcome dari suatu proses politik tetapi rasional Terminasi pulu bisa ditimbulkan kala dalam periode waktu yang lama terjalin kemunduran risorsis( Bardach, 1976). Apabila terminasi tidak dicoba secara cocok, hingga kebijakan tersebut hendak menyebabkan akibat yang kurang baik, Baik diamati dari aspek materinya maupun ideologinya( deleon 1987). Terminasi kebijakan dapat ditetapkan selaku batas dari suatu kebijakan ataupun program yang sudah mencapai tujuan ataupun dini dari proses revisi kebijakan terdahulu yang galat( deleon 1978). Para pengambil keputusan mempunyai tanggungjawab buat secara siuman hendak kondisi dekat dalam memantau kebijakan publik mana yang tidak efektif serta efisien. Berikutnya sesegera mungkin bisa jadi mengeliminir kebijakan tersebut.

Menurut kepada Desa Petungsewu “Bapak Supriyadi” Dengan hadirnya pandemi covid-19 di Indonesia, Tentu ini merupakan suatu wabah yang memiliki dampak yang begitu besar terhadap aktivitas sosial masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Atas kondisi tersebut pemerintah Desa Petungsewu melakukan terminasi terhadap

kebijakan yang telah disepakati bersama pada saat musyawarah rencana pembangunan desa dalam rangka menjawab keresahan yang dialami oleh masyarakat Desa Petungsewu dengan cara melakukan perubahan terhadap program pembangunan yang telah direncanakan bersama menjadi program pemberdayaan masyarakat Desa Petungsewu. Bersumber: Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNAIR maka peneliti tertarik untuk Meneliti “Analisis Kebijakan Perubahan Apbdes Pembangunan Fisik Tahun 2021 Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. Merupakan hal yang penting dalam sebuah desa. oleh karena itu penulis merasa perlu mengkaji “Analisis Kebijakan Perubahan Apbdes Pembangunan Fisik Tahun 2021 Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar balik diatas dapat dirumuskan pokok masalah Bagaimana Analisis Kebijakan Perubahan Apbdes Pembangunan Fisik Tahun 2021 Desa di Desa Petungsewu

## **1.3. Tujuan**

Tujuan dari riset ini adalah Untuk mengetahui Analisis Kebijakan Perubahan Apbdes Pembangunan Fisik Tahun 2021 di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Akademis**

Riset ini berguna untuk menaikkan ilmu pengetahuan untuk periset serta pembaca; Sebagai bahan rujukan bagi periset selanjutnya seta pula selaku bahan pembanding untuk periset berikutnya.

### **2. Secara Praktis**

- a. Buat aparatur pemerintahan: studi ini bermanfaat untuk aparatur pemerintah buat mengevaluasi kembali kebijakan yang yang dan mendengarkan pelaksanaan yang terdapat di lapangan;

- b. Untuk masyarakat warga: Selaku bahan data buat mengenali Terminasi Kompleksitas Kebijakan Desa yang terdapat di Indonesia dan selaku pedoman warga buat bisa turut dan dalam meningkatkan prinsip ini di Indonesia
- c. Untuk Penulis: Riset ini bermanfaat selaku akumulasi ilmu pengetahuan penulis, paling utama dalam bidang Terminasi Kompleksitas Kebijakan Desa yang terdapat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Bardach, E. (1976). "Policy termination as a political process," *Policy Sciences* 7: 123–131.

Brewer, G. D. (1978). "Termination: hard choices, harder questions," *Public Administration Review* 38(3): 338–344.

Brewer, G. D. and deLeon, P. (1983). *The Foundation of Policy Analysis*, Homewood, Ill.: Dorsey.

deLeon, P. (1978). "Public policy termination: an end and a beginning," *Policy Analysis* 4(3): 369–392.

Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNAIR

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp27ba0e7a40full.pdf>. Diakses 20 Agustus 2021.

deLeon, Peter, 1997: Afterward: *The Once and Future State of Policy Termination*, in: *International Journal of Public Administration*, 20, 2195–2212.